

Bidang Ilmu (Prodi) ; Ilmu Hukum

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN**



**IMPLEMENTASI LAYANAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI MBKM**

TIM PENELITIAN

Ketua Peneliti : Eko Yuliasuti, SH., MH (NIDN. 0701077101)

Anggota Peneliti : Novita Setyoningrum, S.H., M.Kn (NIDN. 0714027904)

Anggota Mahasiswa : Gadung Putra Panjalu (NIM. 20107710017)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
TAHUN 2024**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN**

**Judul Penelitian : IMPLEMENTASI LAYANAN BANTUAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR SEBAGAI WUJUD
IMPLEMENTASI MBKM**

Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Identitas Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Eko Yuliasuti, SH., MH
b. NIDN : 0701077101
c. Jabatan Fungsional : -
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 085719870681
f. Alamat surel (e-mail) : ekoyuliasuti@unisbablitar.ac.id

Identitas Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Novita Setyoningrum, S.H., M.Kn
b. NIDN : 0714027904
c. Jabatan Fungsional : -
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP :

Identitas Anggota Mahasiswa

a. Nama Lengkap : Gadung Putra Panjalu
b. NIM : 20107710017
c. Program Studi : Ilmu Hukum

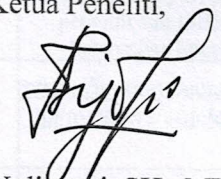
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 7.200.000

Blitar, 19 November 2024

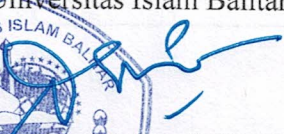
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

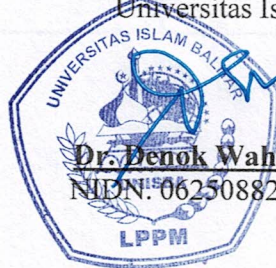

Weppy Susetio, S.H., M.H
NIDN: 0708107902

Ketua Peneliti,


Eko Yuliasuti, SH., MH
NIDN: 0701077101

Menyetujui,
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Islam Balitar


Dr. Denok Wahyudi SR, ST., MM *lwt*
NIDN: 0625088201





LAPORAN AKHIR HIBAH INTERNAL

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh pengusul dan pengelola administrasi penelitian

PENELITIAN TAHUN 2024

Rencana Pelaksanaan : tahun 2024 s.d. tahun 2024

1.IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran		NIDN/NIM	Fakultas/Program Studi
Eko Yuliasuti, SH., MH	Ketua	0701077101	Hukum
Novita Setyoningrum, S.H., M.Kn	Anggota 1	0714027904	Hukum
Gadung Putra Panjalu	Mahasiswa	20107710017	Hukum

2.LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Luaran Penelitian berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (sudah terbit/ sudahtercapai/ sudah terdaftar/ keterangan sejenis lainnya)	Keterangan (volume, nomor, url dan nama jurnal/ penerbit dan ISBN/ url paten/ keterangan sejenis lainnya)
2024	Artikel	Terbit	https://journal.unesa.ac.id/index.php/metafora/article/view/34866



Isian Substansi Laporan Akhir

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

JUDUL

Tuliskan Judul

IMPLEMENTASI LAYANAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI MBKM

RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan dan tahapan metode penelitian, serta luaran yang ditargetkan.

Selain menghasilkan lulusan yang berkualitas secara akademis, Universitas Islam Balitar ingin menciptakan mahasiswa yang peduli terhadap isu-isu sosial dan memiliki kepedulian terhadap keadilan. Layanan bantuan hukum menjadi alat untuk menumbuhkan kesadaran sosial, memungkinkan mahasiswa berkontribusi dalam menyelesaikan masalah hukum masyarakat, sekaligus menciptakan dampak positif dalam konteks yang lebih luas. Dengan mengembangkan layanan bantuan hukum sebagai bagian integral dari MBKM, Universitas Islam Balitar memperkuat peran perguruan tinggi dalam mencetak generasi penerus yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga paham dan berkontribusi pada pembangunan hukum dan keadilan di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi layanan bantuan hukum Universitas Islam Balitar Blitar dalam mewujudkan implementasi MBKM. Desain penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam terkait problematika pengembangan layanan produk halal. Studi kasus akan menambah dimensi kontekstual dan konkrit pada temuan penelitian. Luaran penelitian berupa artikel ilmiah.

Kata Kunci : maksimal 5 kata

Kata kunci: layanan hukum; universitas; implementasi MBKM.

PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 2500 kata yang terdiri dari:

1. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi keterkaitan skema dengan bidang fokus atau rencana penelitian PT.
2. Pendekatan pemecahan masalah
3. *State of the art* dan kebaruan
4. Peta jalan (*roadmap*) penelitian 5 tahun kedepan (jika dalam bentuk konsorsium harus dilengkapi dengan *roadmap* penelitian konsorsium)
5. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver.

LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan tinggi dianggap sebagai landasan utama pembentukan karakter dan integritas mahasiswa [1]. Di tengah dinamika masyarakat modern, pemahaman terhadap hukum dan keadilan bukanlah sekadar opsi, melainkan suatu kebutuhan mendesak [2]. Oleh karena itu, Universitas Islam Balitar di Blitar menganggap penting



untuk mengintegrasikan dimensi hukum dalam pendidikan tinggi sebagai bagian integral dari Mahasiswa Berkeadilan dan Mandiri (MBKM).

Masyarakat kontemporer dihadapkan pada kompleksitas permasalahan hukum yang berkembang pesat [3]. Mahasiswa sebagai calon pemimpin diharapkan dapat menghadapi dan menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Dalam konteks ini, layanan bantuan hukum menjadi instrumen penting untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum yang berlaku serta membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam menanggapi permasalahan hukum [4].

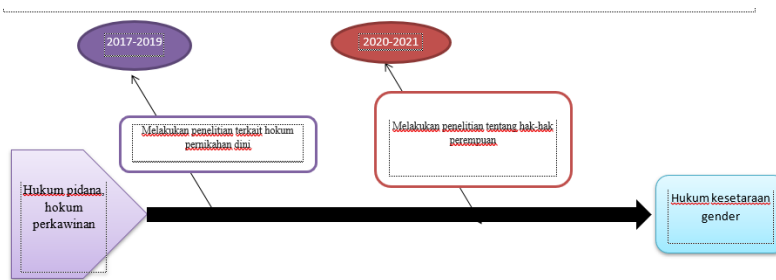
Implementasi MBKM di Universitas Islam Balitar bukanlah sekadar wacana, tetapi sebuah langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Melalui layanan bantuan hukum, perguruan tinggi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata pada pengembangan kompetensi mahasiswa dalam bidang hukum dan keadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip MBKM.

MBKM menekankan pemberdayaan mahasiswa melalui pengalaman praktis [5]. Dengan melibatkan mahasiswa dalam kasus-kasus hukum aktual, bekerja sama dengan praktisi hukum berpengalaman, Universitas Islam Balitar menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang mahasiswa untuk menggabungkan teori dengan pengalaman praktis. Ini memberikan mereka pemahaman yang lebih mendalam dan relevan terhadap dinamika hukum di masyarakat.

Selain menghasilkan lulusan yang berkualitas secara akademis, Universitas Islam Balitar ingin menciptakan mahasiswa yang peduli terhadap isu-isu sosial dan memiliki kepedulian terhadap keadilan. Layanan bantuan hukum menjadi alat untuk menumbuhkan kesadaran sosial, memungkinkan mahasiswa berkontribusi dalam menyelesaikan masalah hukum masyarakat, sekaligus menciptakan dampak positif dalam konteks yang lebih luas [6]. Dengan mengembangkan layanan bantuan hukum sebagai bagian integral dari MBKM, Universitas Islam Balitar memperkuat peran perguruan tinggi dalam mencetak generasi penerus yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga paham dan berkontribusi pada pembangunan hukum dan keadilan di masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi layanan bantuan hukum Universitas Islam Balitar dalam mewujudkan implementasi MBKM?



ROADMAP PENELITIAN



METODE

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1000 kata. Bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG.

Teknik penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini berfokus pada analisis standar hukum yang relevan dan menerapkannya jika diperlukan. Penelitian hukum normatif berusaha untuk memeriksa konsep-konsep hukum yang relevan, doktrin-doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki.

Penerapan Layanan Bantuan Hukum (LBH) di Universitas Islam Bandung (UNISBA) sebagai salah satu komponen dari kebijakan Masa Belajar Kampus Mandiri (MBKM) ditelaah dalam konteks penelitian ini dengan menggunakan metodologi hukum normatif. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, bantuan hukum, dan pendidikan tinggi dianalisis. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan pengadilan dan teori-teori hukum terkait yang membahas tentang akses masyarakat miskin terhadap keadilan.

Bahan-bahan hukum di tingkat dasar, sekunder, dan tersier menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan MBKM dan bantuan hukum, seperti UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan contoh bahan hukum primer. Kamus dan ensiklopedia hukum merupakan contoh bahan hukum tersier, sedangkan publikasi akademis, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, dan literatur hukum merupakan contoh bahan hukum sekunder.



Analisis mengenai bagaimana program MBKM dapat digunakan untuk memasukkan ide bantuan hukum ke dalam sistem pendidikan tinggi juga menggunakan pendekatan konseptual. Metode ini membantu dalam memahami penerapan praktis dari standar hukum dan cara-cara di mana kebijakan MBKM dapat mendorong terwujudnya keadilan sosial, khususnya bagi kelompok-kelompok yang kurang mampu.

Soekanto menegaskan bahwa metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan tiga teknik yang signifikan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, peraturan-peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan LBH di UNISBA dikaji melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus-kasus aktual yang ditangani oleh LBH UNISBA dikaji melalui pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis konsep hukum untuk menyelidiki potensi sinergi antara prinsip-prinsip bantuan hukum dan MBKM dalam kerangka kerja pendidikan tinggi di Indonesia.

HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran. Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Hasil Penelitian

Di Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar, Kampus Merdeka Belajar Mandiri (MBKM) telah diimplementasikan dalam beberapa cara nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum UNISBA merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan strategi ini. BKBH telah melakukan berbagai kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum bersama dengan Pengadilan Agama Kelas 1A Blitar. Kemitraan ini tidak hanya memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa, tetapi juga membuat keadilan lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Kontrak kerjasama Pos Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2023 telah ditandatangani antara BKBH Supremasi Fakultas Hukum UNISBA Blitar dengan Pengadilan Agama Kelas 1A Blitar pada tanggal 2 Januari 2023. Sejumlah anggota dari Fakultas Hukum UNISBA Blitar, termasuk Bapak Weppy Susetiyo, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UNISBA Blitar, serta jajaran dari Pengadilan Agama Kelas 1A Blitar hadir dalam acara ini. Wakil Ketua Pengadilan



Agama Blitar Kelas 1A Blitar, Ibu Dra. Farida Hanim, M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa POSBAKUM merupakan layanan yang berupaya memberikan informasi, konsultasi, atau nasihat hukum di samping pembuatan dokumen hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan melalui kerja sama ini, hak-hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dapat terpenuhi .

Kemitraan ini merupakan langkah strategis yang penting bagi UNISBA dan juga masyarakat Blitar. Sebagai bagian dari implementasi MBKM, UNISBA melihat kolaborasi ini sebagai kesempatan untuk memberikan pengalaman langsung kepada para mahasiswa dalam menangani situasi hukum yang sesungguhnya. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan akademis yang mereka pelajari di kelas ke dalam situasi dunia nyata, mendapatkan pengalaman dan mengembangkan keterampilan praktis yang penting untuk profesi hukum.

Layanan bantuan hukum yang disediakan oleh POSBAKUM sangat bermanfaat bagi individu, terutama bagi mereka yang kurang mampu, dalam menyelesaikan masalah hukum mereka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah masih sulitnya mendapatkan layanan hukum yang terjangkau dan berkualitas tinggi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pedesaan. Kerja sama antara Pengadilan Agama Kelas 1A Blitar dan BKBH Supremasi FH UNISBA Blitar merupakan salah satu contoh bagaimana perguruan tinggi dapat membantu menyelesaikan masalah ini.

BKBH Supremasi FH UNISBA Blitar melakukan penyuluhan dan edukasi hukum selain bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kelas 1A Blitar. Salah satu penyuluhan hukum dilaksanakan di Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Banyak anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam acara ini, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Peduli Keadilan (FKMPK). Mereka yang hadir di antaranya adalah takmir masjid, kepala desa, perangkat desa, anggota karang taruna, pengurus BPD, ibu-ibu PKK, dan aparat keamanan setempat.

Kontribusi nyata kepada masyarakat yang selaras dengan misi MBKM diberikan melalui konsultasi dan pendidikan hukum. Dalam kegiatan ini, para siswa berperan sebagai guru dan memberikan pengetahuan tentang hukum pidana dan perdata, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pernikahan, kehutanan, dan pertanahan. Materi yang disampaikan oleh para pembicara sangat relevan dengan permasalahan



yang dihadapi oleh warga Desa Ngeni, karena mereka sering berurusan dengan masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan tanah.

Masyarakat Desa Ngeni memberikan respon yang sangat positif terhadap inisiatif penyuluhan hukum ini. Mereka berharap acara seperti ini dapat diselenggarakan secara rutin dan merasa bahwa pengetahuan hukum yang diberikan sangat membantu. Hal ini menunjukkan betapa masyarakat sangat membutuhkan penyuluhan hukum. Mereka yang memiliki pengetahuan hukum yang memadai dapat menangani masalah hukum mereka sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari luar pada saat-saat tertentu.

Ada beberapa keuntungan dari kegiatan penyuluhan hukum ini dalam pelaksanaan MBKM. Di satu sisi, mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar dan berlatih dalam lingkungan yang otentik. Mereka memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan masyarakat, menjelaskan konsep-konsep hukum dengan cara yang dapat dimengerti, dan menawarkan jawaban atas masalah yang muncul.

Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat, sangat penting untuk keberhasilan program BKBH Supremasi FH UNISBA Blitar. Kerja sama yang efektif antara masyarakat dan lembaga sangat penting untuk keberhasilan program ini. Selain itu, elemen kunci lain dalam keberhasilan program ini adalah dedikasi universitas untuk terus menciptakan dan mengembangkan layanan bantuan hukum.

Namun demikian, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi untuk mewujudkan program bantuan hukum ini. Salah satunya adalah kurangnya dana yang memadai dan tenaga yang berpengetahuan luas. Diperlukan upaya yang terus menerus untuk mencari bantuan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor komersial, dan kelompok-kelompok non-pemerintah, untuk mengatasi kesulitan ini. Selain itu, perlu juga dilakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi mahasiswa dan staf yang terlibat dalam layanan bantuan hukum, agar mereka dapat memberikan layanan yang lebih profesional dan berkualitas .

Pemberdayaan Mahasiswa

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia meluncurkan Program Belajar di Kampus Mandiri (MBKM) dengan tujuan memberikan fleksibilitas dan kewenangan kepada universitas untuk merancang kurikulum yang lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Program bantuan hukum Universitas Islam Balitar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempraktekkan



pengetahuan hukum mereka. Mahasiswa yang menyelesaikan program ini tidak hanya akan memiliki pemahaman teoritis tentang hukum, tetapi juga akan memiliki kesempatan untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan hukum. Selain meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, mereka akan dapat mengamati secara langsung bagaimana pengetahuan dan kemampuan yang mereka peroleh di kelas digunakan.

Salah satu contohnya adalah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2023, antara BKBH Supremasi Fakultas Hukum UNISBA Blitar dan Pengadilan Agama Kelas 1A Blitar tentang Pos Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM). Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam layanan hukum yang sebenarnya melalui kemitraan ini, yang membantu mereka memahami dan menangani masalah hukum dalam praktik sehari-hari. Selain itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam praktik hukum yang sebenarnya dapat sangat meningkatkan keterampilan analitis dan praktis mereka

Peningkatan Keterampilan Praktis

Bagi mahasiswa hukum, berpartisipasi dalam program bantuan hukum di Universitas Islam Balitar menawarkan pengalaman dunia nyata yang tak ternilai harganya. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan hukum yang mereka dapatkan di kelas ke dalam skenario kehidupan nyata dalam pengaturan simulasi. Melalui interaksi langsung dengan orang-orang yang menghadapi masalah hukum, mereka tidak hanya meningkatkan kemampuan analisis mereka tetapi juga pemahaman mereka tentang kerumitan dan isi hukum seperti yang digunakan dalam masyarakat.

Di Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, program penyuluhan dan pendidikan hukum menjadi gambaran bagaimana layanan bantuan hukum ini menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan praktis para siswa. Dalam kegiatan ini, para mahasiswa berperan sebagai guru dan memberikan pengetahuan tentang hukum pidana dan perdata, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, kehutanan, dan pertanahan. Ini adalah kesempatan yang tak ternilai bagi para siswa untuk mendapatkan keterampilan yang dapat diterapkan dan berguna. Pengalaman langsung sangat penting dalam proses pembelajaran, menurut teori pembelajaran berbasis pengalaman dari Kolb, yang disoroti oleh Saleh dan Yaacob. Program bantuan hukum ini memungkinkan hal tersebut.

Peningkatan Kesadaran Hukum



Kesadaran masyarakat akan hukum dapat meningkat secara signifikan sebagai hasil dari pengenalan layanan bantuan hukum oleh Universitas Islam Balitar. Universitas yang membantu mereka yang membutuhkan untuk mendapatkan akses ke penasihat hukum tidak hanya memberi mereka jawaban nyata atas masalah hukum mereka, tetapi juga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak dan tanggung jawab hukum.

Contoh praktis tentang bagaimana layanan bantuan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat di Desa Ngeni, di mana penyuluhan hukum diberikan kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk kepala desa, perangkat desa, anggota karang taruna, pengurus BPD, ibu-ibu PKK, takmir masjid, dan aparat keamanan setempat. Informasi yang diberikan oleh narasumber cukup relevan dengan masalah yang dihadapi lingkungan sekitar, dan masyarakat Desa Ngeni merespon dengan baik saran tersebut. Penyuluhan hukum partisipatif dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat secara dramatis, menurut penelitian Arba dkk..

Kolaborasi dan Jaringan

Dua inisiatif di Universitas Islam Balitar-layanan bantuan hukum dan kegiatan MBKM-tidak hanya secara langsung membantu mahasiswa tetapi juga membuka jalan bagi kerja sama yang kuat antara mahasiswa, instruktur, dan di luar kelas. Mahasiswa dapat mengembangkan jaringan profesional mereka dan membuat koneksi penting di bidang hukum melalui kolaborasi ini.

Salah satu contoh kemitraan yang produktif adalah kemitraan yang terjalin antara Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A dengan BKBH Supremasi Fakultas Hukum UNISBA Blitar. Perwakilan dari Fakultas Hukum UNISBA Blitar dan sejumlah pejabat dari Pengadilan Agama Blitar hadir dalam penandatanganan pakta kerja sama ini, menunjukkan bagaimana kemitraan ini dapat meningkatkan kesempatan pendidikan mahasiswa dan memperkuat jaringan profesional mereka. Sesuai dengan Hamid teori modal sosial Putnam menunjukkan bahwa mahasiswa dapat memperoleh manfaat yang besar dari jaringan profesional yang kuat dalam hal pengembangan karir dan akuisisi pengetahuan praktis.

Pemberdayaan Masyarakat

Program MBKM di Universitas Islam Balitar dan layanan bantuan hukum secara signifikan meningkatkan masyarakat. Masyarakat yang kurang mampu atau yang membutuhkan akses ke sistem hukum dapat memperoleh bantuan yang mereka butuhkan dengan menggunakan program bantuan hukum. Dengan memberikan akses



ini, program bantuan hukum mendukung akses masyarakat terhadap keadilan dan pada saat yang sama menawarkan jawaban yang spesifik untuk masalah hukum individu atau kelompok.

Sebagai contoh, masyarakat lokal Desa Ngeni secara langsung mendapatkan manfaat dari penyuluhan hukum. Penyuluhan ini memberikan masyarakat lebih banyak pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab hukum mereka, sehingga mereka dapat membela diri di pengadilan. Selain itu, kemitraan penyuluhan ini dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Peduli Keadilan (FKMPK) menunjukkan bagaimana inisiatif MBKM dapat secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Menurut penelitian Chotimah, Widodo, dan Handayani pemberdayaan hukum melalui penyuluhan dapat menurunkan angka pelanggaran hukum di masyarakat.

KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Pelaksanaan program layanan bantuan hukum Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dana untuk mendukung operasional program, seperti pelaksanaan penyuluhan hukum di daerah terpencil. Selain itu, kekurangan tenaga ahli yang berpengetahuan luas juga menjadi hambatan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dalam hal permasalahan hukum. Keterbatasan waktu mahasiswa yang harus membagi fokus antara kegiatan akademik dan praktik lapangan turut menjadi kendala, ditambah dengan perlunya pelatihan lebih lanjut agar mahasiswa mampu memberikan layanan yang berkualitas. Dukungan yang kurang optimal dari pemangku kepentingan tertentu, seperti pemerintah daerah atau organisasi non-pemerintah, juga menghambat pengembangan layanan hukum ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat dan solusi inovatif, seperti mencari mitra pendanaan baru dan mengadakan program pelatihan intensif bagi mahasiswa dan staf yang terlibat.

RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Penelitian ke depan perlu difokuskan pada pengembangan strategi untuk mengatasi



kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program layanan bantuan hukum di Universitas Islam Balitar (UNISBA). Salah satu rencana tindak lanjut adalah mengeksplorasi sumber pendanaan alternatif, seperti hibah dari pemerintah atau sektor swasta, untuk mendukung operasional program. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi mahasiswa dan staf hukum perlu dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan layanan. Penelitian juga dapat diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas metode penyuluhan hukum yang digunakan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Mengembangkan kolaborasi dengan lebih banyak lembaga hukum dan komunitas lokal juga menjadi prioritas, untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Semua langkah ini akan diintegrasikan ke dalam kerangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk memastikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan mahasiswa.

JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan berdasarkan pelaksanaan penelitian.

No.	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Penelitian												
2	Pengumpulan data lapangan												
3	Pengolahan Data												
4	Analisis Data												
5	Laporan Akhir Penelitian												

DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Arba, M., Suryani, A., Sahnani, S., Wahyuningsih, W., & Andriyani, S. (2020). Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2), 259-266.
2. Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 103.
3. Hamid, A. S. A. (2015). Konseptualisasi pembangunan komunitas melalui analisis konsep struktur sosial, teori modal sosial dan perspektif realisme kritis. *Jurnal*



Pembangunan Sosial, 18, 21-40.

4. Ibrahim, I., Cut, M. Z., & Marwan, M. (2021). *Dinamika Kampus Merdeka & Merdeka Belajar*.
5. Mustari, M. (2022). *Manajemen pendidikan di era merdeka belajar*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
6. Ni'matunnuriyah, N. M. (2021). *Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor. 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Perkara Keluarga* (Doctoral dissertation, IAIN Madura).
7. Saleh, N. S., & Yaacob, H. F. (2014). Aplikasi teori pembelajaran kolb dan kompetensi doktor pelatih. *Sains Humanika*, 2(1).
8. Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
9. Sonjaya, R., & Iskandar, T. P. (2022). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNPAS Bandung. *Membaca MBKM Dalam Ilmu Komunikasi*, 33-38.
10. Yuherman, Y., Nugroho, W., & Sunarsi, D. (2021). Dampak Kebijakan MBKM Pada Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Fakultas Hukum Usahid Jakarta. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 222-244.
11. Yulindaputri, T., & Sutrisno, S. (2023). Analisis Problematika PTKIN di Indonesia dalam Melaksanakan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 13(1), 67-79.

LAMPIRAN

Berisi *Url, Screenshot*, ISBN Luaran yang terkait dengan laporan Penelitian yang telah dilaksanakan.

e-ISSN:2580-5177

<https://journal.unesa.ac.id/index.php/metafora/article/view/34866>



Implementation of Balitar Islamic University of Blitar Legal Aid Services as a Form of MBKM

Eko Yuliastuti

Balitar Islamic University Blitar
e-mail: yuliastutieko23@gmail.com

Novita Setyoningrum

Balitar Islamic University Blitar
e-mail: novitaset@gmail.com

Gadung Putra Panjalu

Balitar Islamic University Blitar
e-mail: panjalugadung@gmail.com

Abstract

This research aims to evaluate the implementation of Legal Aid Services (LBH) at the Bandung Islamic University (UNISBA) as part of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program. The method used is normative legal research, which involves analysis of relevant legislation and legal documents. The research results show that LBH UNISBA, through its partnership with the Blitar Religious Court and legal education activities in Ngeni Village, has succeeded in increasing access to justice for underprivileged communities and providing valuable practical experience for students. Students gain practical skills and an in-depth understanding of the law, while the public receives legal assistance and education that supports their legal awareness. This program strengthens the relevance of the curriculum and shows the synergy between higher education and the needs of society, in line with MBKM's goal of creating learning that is more connected to the real world.

Keywords: legal aid; POSBAKU; UNISBA.

INTRODUCTION

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) is a policy from the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia which aims to give higher education institutions more freedom and autonomy to foster a more innovative learning environment that is not limited to the classroom but is more relevant to needs, industry and society (Sonjaya & Iskandar, 2022). One of the strategic steps taken by the Bandung Islamic University (UNISBA) to answer educational problems in the context of the Industrial Revolution 4.0 is to adopt MBKM.